



SELAMAT HARI JADI KE-192

KABUPATEN PURWOREJO



H AGUS BASTIAN, SE, MM
Bupati Purworejo



YULI HASTUTI, SH
Wakil Bupati Purworejo



DPD KABUPATEN PURWOREJO

YOPPI PRABOWO, KELIK SUSILO ARDANI, DION AGASI SETYABUDI, FRAN SUHARMAJI

KELUARGA BESAR

MA AN-NAWAWI

BERJAN PURWOREJO

Madrasah Berbasis Pondok Pesantren TERAKREDITASI A

PENDAFTARAN SISWA BARU: 6 Maret - 6 April 2023
Pendaftaran Online: www.maannawawi.sch.id

Alamat: Jl. K.H. Zarkasyi, Berjan, Gintungan, Gebang, Purworejo, Telp. (0275) 3128504

H. SAHLAN, S.Ag., MSI.
Kepala Madrasah

PENDIDIKAN TERINTEGRASI

MTs AN-NAWAWI

BERJAN

Madrasah Berbasis Pondok Pesantren

Alamat: Jl. K.H. Zarkasyi, Berjan, Gebang, Putworejo 54191

Muh Taufik Fauzi, S.H.I., M.Pd.
Kepala Madrasah

KELUARGA BESAR

DEWAN PENGURUS DAERAH

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

KABUPATEN PURWOREJO

Ketua
Heru Agung Prastowo, S.Kep., Ns., M.M



Kinkin Bakery

CAKE & BAKERY

PESAN ROTI? Aja!

kinKEN

Datangi Gerai Kami di:

- Jl. Diponegoro 141 B, Kutoarjo, (0275) 642812
- Jl. Jend. Sudirman 73 B, Purworejo, (0275) 324315



CV. NARO WIJAYA

SUPPLIER - GENERAL TRADING - GENERAL CONTRACTOR

Gg. Afrikan II No.22 Pangen Jurutengah.
TELP. (0275) 321 314

DIREKTUR
ARIS BUDI SANTOSO

KELUARGA BESAR

PT. PLN (PERSERO)

ULP. PURWOREJO

KELUARGA BESAR

PT. PLN (PERSERO)

ULP. KUTOARJO

KELUARGA BESAR

POLOSORO

PAGUYUBAN KEPALA DESA, KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PURWOREJO

KETUA
SUWARTO

KELUARGA BESAR

SMK TKM TEKNIK TAMANSISWA PURWOREJO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No 8 Purworejo - 54111
Telp. (0275) 522590

Kepala Sekolah:
Ki Joko Purwanto Setiyono, S.T., M.Pd.



PT. KARYA PUTRA PEMBINA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

office : CANDINGASINAN, BANYUURIP PURWOREJO - JAWA TENGAH
telp. (0275) 324024

Timbul Pramono
DIREKTUR



PT. EKA KARYA ASTHA

Jl. Brigadir Jenderal Katamso, No. 57 Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. (0275) 321 277



Koran Merapi

Tuntas Tanpa Tendensi



Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 36 PURWOREJO

Kusnan Kadari, M.Pd.
Kepala Sekolah



CV. SAPTO ARGO

KONTRAKTOR - SUPPLIER - PERDAGANGAN UMUM

Kebongunung, Loano, Purworejo
Telp. : 085.327.492.994

DEKLARASI PENGAWASAN PEMILU 2024

Ajak Semua Elemen Lakukan Pengawasan

BANTUL (KR) - Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-DIY menggelar Deklarasi Pengawasan Bersama Pemilu Serentak Tahun 2024 di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat turut serta melakukan pengawasan tahapan pemilu.

"Selain itu, deklarasi pengawasan bersama ini dalam rangka mengoptimalkan pengawasan partisipatif dari berbagai aspek," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina dalam pernyataan pers usai Deklarasi di Bantul, Minggu (26/2). Menurut Harlina, pengawasan bersama oleh jajaran Bawaslu dan elemen masyarakat pada Pemilu 2024 merupakan ikhtiar dan upaya menjaga demokrasi yang berkualitas dan bermartabat, sehingga pemilu nanti bisa terlaksana dengan lancar (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil). Ia mengatakan, deklarasi

pengawasan bersama ini merupakan suatu puncak momentum tindak lanjut satu tahun menjelang Pemilu 2024, di mana pada 14 Februari 2023 sesuai dengan Instruksi Bawaslu RI, Bawaslu telah melakukan 'Aksi Siaga Kampanye Pengawasan Bersama'. "Aksi siaga kampanye pengawasan juga dilakukan secara serentak sampai di tingkat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan dan Panwaslu desa," katanya. Ia juga mengatakan, Bawaslu juga melakukan sosialisasi terkait 'Jarimu Awasi Pemilu' yang merupakan komunitas digital

pengawasan partisipatif dengan berfokus peran masyarakat pada pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024. "Khususnya pertukaran informasi pengawasan Pemilu secara digital serta sosialisasi posko kawal hak pilih," jelas Herlina. Bawaslu, ujarnya, juga memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan pemilu. Dengan demikian, tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu demi menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan Deklarasi Pengawasan Bersama Pemilu Serentak Tahun 2024 dihadiri seluruh jajaran Bawaslu se-DIY, Forkopimda, KPU, Camat, Lurah Desa APU (Antipolitik Uang) pimpinan ormas serta masyarakat umum yang diawali dengan senam bersama. (Ant)-f

JAKSAAGUNG BURHANUDDIN:

Jaksa Harus Gunakan Hati Nurani

JAKARTA (KR) - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengimbau seluruh jajarannya untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan substantif atau yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dalam melakukan tugas-tugas penegakan hukum. Menurut Burhanuddin, hal itu dapat diwujudkan dengan kemampuan menggali nilai-nilai hukum di masyarakat, mengingat jaksa bukanlah cerobong Undang-Undang yang bersifat kaku, baku, dan membeku. "Jaksa harus menggunakan hati nurani di setiap pengambilan keputusan dalam proses penegakan hukum. Karena hati nurani tidak ada dalam buku, gunakan kepekaan sosial saudara-saudara," kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/2). Jaksa Agung meyakini, pendekatan keadilan formalistik yang dibelenggu aturan bersifat kaku demi mengejar kepastian hukum tidak dapat dipertahankan lagi. Perubahan paradigma tersebut membuat kerja-kerja Kejaksaan bukan sekadar melaksanakan kewenangan negara untuk melimpahkan suatu perkara ke pengadilan, tetapi juga menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) serta interpretasi yang ber-

tumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Lebih jauh, adaptasi paradigma keadilan substantif dituangkan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal itu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 30C huruf b dan c mengatur Kejaksaan turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Karena itu, Jaksa Agung menekankan kewenangan jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan harus dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, kearifan lokal, serta nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam masyarakat. Pasalnya, hal itu memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat, serta menuntut adanya perubahan mindset, perilaku, dan kepastian hukum yang diterima oleh masyarakat. (Ant/San)-f

Syarat Rekomendasi Pengurusan Paspur dari Kemenag Dicabut

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, syarat penggunaan rekomendasi pengurusan paspor umrah dari Kemenag yang dicabut, merupakan kewenangan imigrasi. Ketentuan penggunaan rekomendasi pengurusan paspor umrah dari Kemenag diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemendikbud sebagai pihak yang berwenang menerbitkan paspor pada tahun 2017. "Pihak Imigrasi memang yang mempersyaratkan itu. Jadi kalau itu dicabut kembali, sudah sesuai kewen-

angannya. Semoga bisa memudahkan jemaah," ujar Jubir Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (26/2). Ia mengemukakan, sekitar awal Maret 2017, Kemenag menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi mengenai adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kemenag dalam proses pengurusan paspor umrah. "Dulu yang mempersyaratkan rekomendasi Kemenag itu Ditjen Imigrasi. Jadi sejak dulu tidak ada upaya Kemenag untuk mempersulit

penerbitan bisa umrah," paparnya. Ia menambahkan, Kemenag saat ini diminta memberitahukan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota tentang adanya persyaratan tambahan tersebut agar mereka bisa menindaklanjutinya. "Edaran Ditjen Imigrasi itu lalu diinformasikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Karena sudah dicabut, nantinya jemaah sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag," katanya. (Ant)-f

10 Juta Ton Sampah Organik Tak Lagi Dibuang ke TPA

JAKARTA (KR) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan sebanyak 10,92 juta ton sampah organik tidak lagi dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengajak masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri melalui kegiatan pembuatan kompos. "Jika seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan sampah organik sisa makanan setiap tahun secara mandiri di rumah, maka kira-kira ada 10,92 juta ton sampah organik tidak dibawa ke TPA dan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 6,8 juta ton setara karbon dioksida," ujarnya dalam acara

Gerakan Hari Kompos di Jakarta, Minggu (26/2). Menteri Siti memaparkan, jumlah timbulan sampah di Indonesia saat ini mencapai 68 juta ton pertahun dengan komposisi terbesar sampah organik sisa makanan yang mencapai 41,27 persen dan sekitar 38,20 persen timbulan sampah itu bersumber dari rumah tangga. Menurutnya, bila sampah organik tidak dikelola secara maksimal bisa memperparah dampak pemanasan global yang memicu perubahan iklim dan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hingga kesehatan. Sampai 2022, KLHK mencatat masih ada kegiatan penanganan sampah konvensional berupa angkut dan buang ke TPA. Kegiatan itu akan

dikurangi secara bertahap melalui aktivitas pengelolaan sampah dari rumah. "Sampah organik yang ditimbulkannya di TPA akan menghasilkan gas metana yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menangkap panas di atmosfer dibandingkan karbon dioksida," kata Siti. Menurutnya, kondisi tersebut mempertegas bahwa pengelolaan sampah organik khususnya sampah sisa makanan sangat penting dan perlu menjadi perhatian juga. Dalam upaya mencapai target nol sampah atau zero waste, KLHK mengajak masyarakat meningkatkan pendekatan atau cara lama berupa kumpul, angkut, dan buang yang menitikberatkan terhadap pengolahan sampah di TPA. (Ant/San)-f

Pintu Darurat Dibuka Penumpang, Pesawat Batal Terbang

KUPANG (KR) - Pesawat Lion Air milik maskapai penerbangan Lion Air rute Kupang-Surabaya, batal terbang akibat pintu darurat pesawat itu dibuka penumpang saat hendak lepas landas dari bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (26/2) pagi. "Betul, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 697 batal terbang karena dibukanya pintu emergency exit," kata Humas Bandara El Tari Kupang Devi Budihandayani saat dikonfirmasi di Kupang. Usai batal terbang, para penumpang pesawat itu langsung diminta untuk turun semuanya dari pesawat konvensional berupa angkut para penumpang panik.

Devi menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak maskapai penerbangan, diketahui pintu darurat itu dibuka oleh seorang penumpang pesawat karena gawai milik salah satu penumpang pesawat tersebut mengeluarkan asap saat pesawat hendak lepas landas. "Handphonenya mengeluarkan asap saat dia simpan di dalam saku," ujarnya. Devi menjelaskan, kare-

na panik gawainya mengeluarkan asap, penumpang tersebut lalu melemparkan gawainya ke lantai lorong kabin sehingga langsung memicu alarm pendeteksi asap. "Mendengar alarm berbunyi spontan, salah satu penumpang lantas membuka pintu darurat," ungkapnya. Penumpang yang gawainya mengeluarkan asap tersebut kemarin masih menunggu informasi keberangkatan dari pihak maskapai. Para penumpang pesawat tersebut, juga lantas berada di dalam ruang tunggu menunggu informasi selanjutnya. Sementara pesawat Lion Air itu sendiri dalam kondisi normal dan menunggu clearance dari engineering. (Ant)-f



KR-Antara/Tangkapan layar Kornelis Kaha

Sejumlah penumpang turun dari pesawat akibat pintu darurat pesawat tersebut dibuka penumpang di Bandara El Tari Kupang.